

Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Setujui Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024



Sumber gambar:

<https://wartaniaga.com/wp-content/uploads/2024/08/Pemkab-Balangan-dan-DPRD-Balangan-Setujui-Raperda-Perubahan-APBD-TA-2024-e1722993889786-768x431.jpeg>

Pemerintah Kabupaten Balangan bersama DPRD Balangan melakukan kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

Kesepakatan tersebut berlangsung pada rapat paripurna DPRD Balangan ke 25 masa sidang ke II tahun 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Balangan.

Bupati Balangan, H Abdul Hadi mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam jalannya penyusunan raperda perubahan APBD 2024 hingga mencapai kesepakatan.

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas tuntasnya pembahasan terkait raperda tersebut,” ujarnya.

Abdul Hadi mengatakan, raperda perubahan APBD tahun 2024 ini merupakan bentuk kepekaan pemerintah daerah dalam merespon berbagai perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat untuk mencapai target yang telah ditetapkan, ungkapnya kepada awak media, Selasa (6/8/2024).

“Kami menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan kami, sehingga banyak pula keinginan masyarakat yang masih belum kami penuhi,” ucapnya.

Ia menyadari, meskipun dengan peningkatan kemampuan anggaran yang Kabupaten Balangan peroleh, masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan daerah dan keinginan masyarakat.

“Di situ kita dihadapkan pada realita bahwa tidak semua permasalahan bisa diatasi dengan kemampuan anggaran,” ujarnya.

Adapun untuk raperda perubahan APBD tahun 2024 untuk pendapatan daerah adalah sebesar sebesar Rp 4.205.752.006.020 atau naik sekitar 21,69 dari anggaran awal.

Kemudian untuk, belanja daerah sebesar Rp 4.096.523.542.023 atau naik sekitar 22,30 persen dari anggaran awal dengan surplus pendapatan terhadap belanja sebesar Rp 109.228.463.997.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah menyampaikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang mencapai Rp 4,2 triliun dalam rapat paripurna baru-baru ini. Dana tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

“Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama kami. Dirjen Bina Keuangan Daerah menghendaki agar APBD digunakan maksimal untuk pembangunan infrastruktur serta belanja wajib lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan investasi,” kata Bupati Balangan, H Abdul Hadi, Jumat (2/8/2024).

Untuk investasi, Kabupaten Balangan telah menyusun raperda untuk penyertaan modal ke Bank Kalsel dengan total investasi sekitar Rp 830 miliar pada 2024.

“Meski kita berinvestasi besar ke Bank Kalsel, bukan berarti kita melalaikan pembangunan infrastruktur. Insya Allah, apa yang telah disetujui bersama antara dewan dan pemerintah daerah sudah mencakup hal-hal yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah Abdul Hadi.

Sementara itu, Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan, menyampaikan bahwa raperda perubahan APBD tahun 2024 dan APBD 2025 akan ditindaklanjuti oleh DPRD Balangan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Kami akan menjadwalkan pembahasan bersama SKPD terkait, seperti sektor pembangunan dan hal-hal lainnya dalam rapat kerja,” ujarnya.

Dalam rapat kerja tersebut, prioritas dan top prioritas akan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat Kabupaten Balangan.

Sumber Berita

1. <https://wartaniaga.com/2024/08/pemkab-balangan-dan-dprd-balangan-setujui-raperda-perubahan-apbd-ta-2024/>, Pemkab Balangan dan DPRD Balangan Setujui Raperda Perubahan APBD TA 2024, (07/08/2024).
2. <https://www.habarbangan.com/2024/08/02/perubahan-apbd-2024-pemkab-balangan-prioritaskan-infrastruktur/>, Perubahan APBD 2024, Pemkab Balangan Prioritaskan Infrastruktur, (02/08/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Laporan realisasi semester pertama menjadi dasar perubahan APBD.
- 2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d) keadaan darurat; dan/atau
 - e) keadaan luar biasa